

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara tidak lepas dari peran tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang penting dalam perekonomian suatu negara, baik dalam konteks mikroekonomi (tingkat individu atau perusahaan) maupun makroekonomi (tingkat nasional atau global). Dalam sistem ekonomi, tenaga kerja tidak hanya berfungsi sebagai pelaku produksi, tetapi juga sebagai konsumen yang menciptakan permintaan pasar, sekaligus sebagai agen pembangunan melalui peningkatan produktivitas dan inovasi (Puspaningsih, 2024).

Kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian dan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan faktor penting. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin besar potensi output yang dapat dihasilkan. Namun, aspek kuantitatif ini tidak cukup jika tidak didukung oleh kualitas tenaga kerja yang mencakup tingkat

pendidikan, keterampilan, kesehatan dan pengalaman kerja sangat menentukan produktivitas (Alisya et al., 2024).

Penyerapan tenaga kerja yang optimal merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, karena hal ini tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja di masing-masing wilayah di Indonesia berbeda-beda dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Antar Pulau

Tahun 2019-2023 (Jiwa)

	Pulau Sumatera	Pulau Jawa	Pulau Sulawesi	Pulau Kalimantan	Pulau Bali NT	Pulau Papua Maluku
Rata-rata Jumlah Penduduk	57.667.840	153.190.120	20.137.700	16.851.280	15.221.020	9.294.879
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	6,84 %	12,79 %	6,85 %	7,25 %	10,29%	13,61%

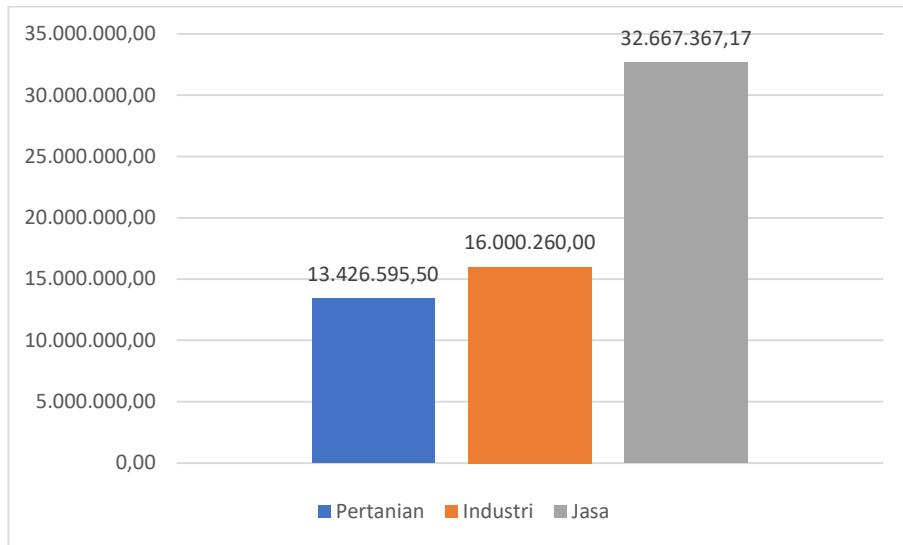
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pulau yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu Pulau Jawa namun penyerapan tenaga kerjanya menjadi tertinggi kedua setelah Pulau Papua Maluku, sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu ada di Pulau Papua Maluku namun dengan persentase penyerapan tenaga kerja nya paling tinggi diantara pulau lainnya. Pulau jawa yang tingkat penyerapan nya hanya 12,79% tentunya tidak sebanding dengan jumlah penduduk nya yang paling padat diantara pulau yang lainnya. Hal itu menjadi tantangan yang cukup kompleks karena Pulau Jawa menjadi tempat pusat perekonomian dan menjadi penyumbang PDB tertinggi di Indonesia sehingga memiliki konsentrasi penduduk tertinggi sekitar 56% populasi nasional (Aberth, 2024).

Berdasarkan tabel 1.1 yang paling menarik yaitu perbandingan antara Pulau Jawa dan Pulau Papua Maluku yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dan terendah namun tingkat penyerapan tenaga kerja nya lebih tinggi Pulau Papua Maluku daripada Pulau Jawa yang menjadi tertinggi kedua. Penyerapan tenaga kerja di wilayah Papua dan Maluku tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah penduduk, melainkan juga oleh karakteristik struktur ekonomi yang didominasi industri ekstraktif, pengolahan hasil perikanan, serta keberadaan investasi besar seperti pembangunan smelter dan proyek infrastruktur yang cenderung bersifat padat karya karena adanya kebijakan pemerintah yang terus mendorong program hilirisasi dapat terealisasi dengan baik (Radhica & Wibisana, 2023).

Hal ini berbeda dengan Pulau Jawa yang sebagian besar industrinya lebih bersifat kapital-intensif sehingga penyerapan tenaga kerja relatif lebih rendah meskipun kontribusi terhadap PDRB lebih besar.

Meskipun penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tidak sebanding dengan kepadatan penduduknya, tetapi Pulau Jawa tetap menjadi pusat perekonomian di Indonesia dan memiliki banyak sektor pekerjaan. Namun sektor industri tetap menjadi penopang penting dalam perekonomian di Pulau Jawa, terutama di daerah industri besar. Pada saat ini sektor industri menghadapi tantangan besar seperti otomatisasi, digitalisasi, dan isu lingkungan (*green industry*). Sehingga ketergantungan berlebihan pada industri juga berisiko seperti terjadinya PHK masal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.1 Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Ekonomi di Pulau Jawa (Jiwa)

Berdasarkan gambar 1.1 penyerapan tenaga kerja sektor industri menjadi tertinggi kedua di Pulau Jawa hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa mengalami transformasi ekonomi dari pertanian yang semakin berkurang perannya, sementara jasa meningkat pesat. Namun, industri berada di titik strategis transisi dari sektor primer (pertanian) ke sektor tersier (jasa), artinya sektor industri menjadi jembatan transformasi ekonomi yang dapat menentukan arah perkembangan ekonomi termasuk dampaknya pada distribusi tenaga kerja.

Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan industri di Indonesia memegang peran strategis dalam pembangunan nasional dan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Namun sektor industri ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan produktivitas, persaingan global, dan dampak industrialisasi terhadap lingkungan. Selain itu, tantangan dalam penyerapan tenaga kerja juga

masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Meskipun sektor industri menawarkan lapangan kerja yang signifikan, tingkat pengangguran dan ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri masih menjadi isu yang mengemuka (Azizah et al., 2024).

Pertumbuhan industri di Pulau Jawa didukung oleh infrastruktur yang relatif maju, ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah, serta kebijakan pemerintah yang mendukung investasi. Namun, penyerapan tenaga kerja di sektor ini tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan industri. Dinamika penyerapan tenaga kerja di sektor industri tidak terlepas dari berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi, seperti pertumbuhan PDRB, investasi, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diukur melalui Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK), serta jumlah unit usaha industri yang beroperasi. Selain itu, adanya automasi dan digitalisasi dalam proses produksi juga berdampak pada permintaan tenaga kerja, terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang.

Penyerapan tenaga kerja tentunya berkaitan dengan teori permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi. Apabila permintaan akan suatu barang produksi mengalami peningkatan, maka perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Sehingga nama lain dari permintaan tenaga kerja disebut sebagai *derived demand* atau permintaan turunan (Borjas, 2016).

Penyerapan tenaga kerja industri di Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling dominan diantara yang lainnya karena merupakan wilayah pusat industri dan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Perkembangan tenaga kerja di Pulau Jawa

ini masih tidak merata di setiap wilayahnya, di mana beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sementara wilayah lainnya masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Berikut adalah data perkembangan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2019 dan 2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.2 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa (Jiwa)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa antara tahun 2019 dengan tahun 2023 cukup signifikan perbedaan nya antar provinsi dan yang paling tinggi yaitu ada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meskipun pertumbuhan di setiap provinsi nya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi terutama di Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 provinsi yang cukup rendah tingkat penyerapannya dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu ada di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten.

Hal ini dapat terjadi pada Provinsi DKI Jakarta disebabkan beberapa hal seperti penyerapan tenaga kerja yang lebih di dominasi oleh sektor jasa keuangan, perdagangan, atau jasa lainnya yang awal nya banyak industri manufaktur berlokasi di Provinsi DKI Jakarta namun mulai bergeser ke daerah penyangga seperti Jawa Barat karena alasan biaya operasional, lahan yang lebih murah, dan infrastruktur yang mendukung.

Provinsi DI Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri nya terendah dibandingkan yang lainnya disebabkan karena struktur ekonomi yang lebih berbasis jasa yaitu berupa pariwisata dan pendidikan. Selain itu keterbatasan lahan atau ruang untuk kawasan industri skala besar juga menjadi salah satu faktor tingkat penyerapan tenaga kerja nya rendah sehingga industri yang lebih banyak di DIY yaitu skala kecil berupa UMKM yang hanya dapat menyerap sebagian kecil angkatan kerja.

Penyerapan tenaga kerja sektor industri di provinsi Banten lebih rendah daripada provinsi lain karena struktur industri nya yang cenderung padat modal yang menggunakan teknologi tinggi dan mesin otomatis, oleh karena itu output tinggi tetapi tanaga kerja relatif sedikit dibanding industri padat karya. Sehingga kebutuhan tenaga kerja pada industri besar diharuskan memiliki keahlian dan kemampuan teknis tinggi dan sesuai pada bidangnya.

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan terjadinya fluktuasi di Pulau Jawa yang menandakan bahwa dari banyak nya tenaga kerja yang terserap namun tidak dapat bertahan lama dan konsisten antar tahun nya sehingga hal ini dapat terjadi karena banyak faktor yang menyebabkan pada operasional perusahaan dengan

diberlakukan nya pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sekaligus menurun nya pendapatan masyarakat.

Terjadinya fluktuasi pada penyerapan tenaga kerja sektor industri ini diiringi juga dengan meningkatnya tren PHK dari tahun ke tahun yang di dominasi oleh provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini menjadi persoalan penting untuk tenaga kerja yang ada di Pulau Jawa dimana tempat yang menjadi pusat indutri namun menjadi wilayah yang paling banyak terjadinya PHK dibandingkan wilayah lainnya (C. Dwi, 2024).

Pada periode 2019-2023 pasar tenaga kerja Indonesia bergerak sangat dinamis, berbagai peristiwa penting mewarnai seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja anjlok, berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, ketidakpastian ekonomi global, juga berkembangnya inovasi kecerdasan buatan generatif yang dikhawatirkan menggantikan tenaga kerja manusia (Mediana, 2024).

Setiap peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor industri menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang aktif dalam sektor tersebut. Hal itu tidak terlepas dari tingkat produktivitas dan output ekonomi sektor tersebut. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sering kali diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.

PDRB tidak hanya menjadi indikator kinerja ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor industri. Sektor industri sendiri merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi

karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDRB dan kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Di banyak negara termasuk Indonesia, sektor industri dianggap sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga mendorong perkembangan sektor-sektor lain melalui efek multiplier-nya. Namun, hubungan antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri tidak selalu linier. Pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama jika pertumbuhan tersebut didorong oleh adopsi teknologi yang bersifat padat modal tetapi kurang padat karya (Kesumawati & Fisabilillah, 2024).

Tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dengan PDRB sektor industri sangat erat kaitan nya karena dapat menjadi indikator utama yang merepresentasikan sejauh mana sektor ini berperan dalam perekonomian daerah, dimana pada daerah yang memiliki pertumbuhan tenaga kerja nya sangat signifikan itu dapat tercermin dari PDRB suatu wilayah tersebut di berbagai sektor nya.

PDRB sektor industri dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri dengan asumsi jika PDRB meningkat maka jumlah nilai output di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk menambah jumlah tenaga kerjanya agar dapat mengimbangi peningkatan penjualan yang terjadi. Berikut data PDRB sektor industri setiap Provinsi di Pulau Jawa yang cukup signifikan perbedaan nya dan terus mengalami peningkatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1.3 Data PDRB Sektor Industri Provinsi di Pulau Jawa
(Miliar Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat kontribusi PDRB sektor industri di pulau Jawa antara tahun 2019 dengan 2023 itu terjadi peningkatan di setiap wilayahnya, hal ini menunjukkan dengan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja namun PDRB di Pulau Jawa dapat konsisten bertahan dan meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2023. Sedangkan untuk penyumbang PDRB tertinggi di Pulau Jawa antara tahun 2019 dan 2023 yaitu Provinsi Jawa Barat dan yang terendah yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

Pertumbuhan PDRB tersebut menandakan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan juga meningkat, jika produksi meningkat maka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga banyak angkatan kerja yang terserap.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri yaitu dengan adanya investasi. Meningkatnya investasi akan berdampak

pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri karena akan membuka atau memperluas kesempatan kerja, sehingga akan menyerap sumber daya manusia yang lebih banyak. Hubungan antara investasi dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunanya (Yuniar & Devi, 2024).



Sumber: Badan Pusat Stat (data diolah)

Gambar 1.4 Data Investasi di Pulau Jawa (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4 mengenai data investasi Pulau Jawa pada tahun 2019 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan di setiap provinsi nya kecuali pada Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, namun data investasi yang tertinggi di Pulau Jawa yaitu ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut Kementerian Keuangan secara umum, Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan PMA dan PMDN utama secara nasional, sejalan dengan banyaknya industri dan kawasan industri yang berkembang di Jawa Barat. Hal ini karena adanya dukungan implementasi paket

kebijakan ekonomi khususnya dalam mempermudah kegiatan investasi dan pengurusan perizinan juga menjadi salah satu faktor penarik PMA ke Jawa Barat. Hal ini cukup baik untuk dapat dijalankan oleh provinsi lainnya dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri (DJPB, 2022).

Melalui adanya investasi, sektor industri dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengadopsi teknologi baru, dan memperluas pasar yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun, hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu linier. Investasi yang bersifat padat modal, mungkin tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja jika lebih mengandalkan teknologi dan mesin daripada tenaga manusia. Maraknya investasi di suatu wilayah, tentunya akan membawa beberapa manfaat yang positif bagi wilayah yang bersangkutan (Gwijangge et al., 2018).

Penyerapan tenaga kerja pada saat ini selalu bersanding dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dapat mengubah pola hidup masyarakat. Perkembangan teknologi yang diukur oleh indeks Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi ekonomi global. Kemajuan TIK tidak hanya mengubah cara bisnis dilakukan, tetapi juga memengaruhi struktur pasar tenaga kerja, khususnya di sektor industri. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan adopsi TIK di suatu wilayah atau negara. IP-TIK mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap infrastruktur TIK, keterjangkauan, dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat.

Sektor industri, sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian, sangat dipengaruhi oleh perkembangan TIK. Di satu sisi, adopsi TIK dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan keterampilan tinggi. Di sisi lain, otomatisasi dan digitalisasi berpotensi menggantikan tenaga kerja manusia, terutama untuk pekerjaan rutin dan berulang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana IP-TIK memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Jika pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak diimbangi dengan pengembangan para tenaga kerja yang terus meningkatkan skill dan kemampuan mereka, maka posisinya bisa tergantikan oleh teknologi yang berkembang pesat.

Menurut Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan) pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (*technological progress*). Solow mengatakan bahwa di dalam pertumbuhan ekonomi peran dari kemajuan teknologi ini sangat dominan (Amalia et al., 2016).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.5 Perkembangan IP-TIK di Pulau Jawa (Persen)

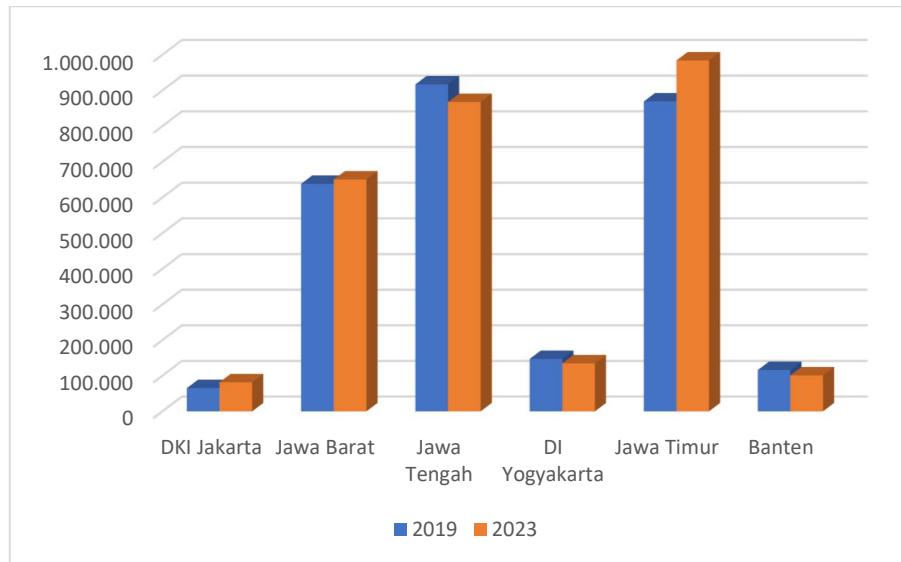
Berdasarkan gambar 1.5 perkembangan IP-TIK di setiap provinsi dari tahun 2019 ke tahun 2023 terus mengalami peningkatan dan angka IP-TIK paling tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta itu berarti bahwa DKI Jakarta didorong oleh pencapaian tiga subindeks pembangunan TIK yaitu sub-indeks akses dan manufaktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian yang terbilang cukup baik. Kemudian tingkat IP-TIK terendah ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah, hal ini karena Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang rata-rata masyarakatnya masih konvensional atau kental dengan adat istiadat (BPS, 2020).

IP-TIK mengukur sejauh mana masyarakat dan wilayah memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, maupun ekonomi. Perkembangan IP-TIK di Pulau Jawa menunjukkan arah yang positif, dengan tren peningkatan di semua provinsi. Namun, terdapat kesenjangan digital antar provinsi karena tingkat IP-TIK berhubungan erat dengan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing regional.

Salah satu indikator penting penyerapan tenaga kerja sektor industri adalah jumlah unit usaha industri yang beroperasi. Jumlah unit usaha industri mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di sektor industri, yang pada gilirannya dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak unit usaha industri yang beroperasi, semakin besar potensi penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, hubungan antara jumlah unit usaha industri dan penyerapan tenaga kerja sektor industri tidak selalu bersifat linier. Faktor-faktor seperti skala usaha, jenis industri, tingkat teknologi yang digunakan, dan kebijakan pemerintah dapat

memengaruhi sejauh mana pertumbuhan jumlah unit usaha industri berdampak pada penyerapan tenaga kerja sektor industri. Misalnya, unit usaha skala besar yang padat modal mungkin tidak menyerap tenaga kerja sebanyak unit usaha skala kecil dan menengah yang cenderung lebih padat karya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.6 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri di Pulau Jawa

Berdasarkan gambar 1.6 jumlah unit usaha industri di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun nya, dan provinsi yang jumlah unit usaha nya paling tinggi yaitu ada di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Terjadinya fluktuasi di semua wilayah dari tahun ke tahun yang disebabkan karena adanya penurunan dari konsumsi masyarakat serta perekonomian global yang melambat sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, dengan berkurang nya jumlah unit usaha dapat mempengaruhi tenaga kerja yang mula nya aktif dan melakukan pekerjaan nya jadi terhenti.

Menurut Teori Keynes yang menekankan bahwa permintaan efektif (total pengeluaran) adalah faktor utama dalam kesempatan kerja, jika permintaan efektif rendah maka Perusahaan akan mengurangi produksi dan tenaga kerja yang mengarah pada pengangguran. Keynes berpendapat bahwa dalam mengatasi hal tersebut harus ada campur tangan dari pemerintah, intervensi dapat berupa belanja pemerintah dan kebijakan fiskal lainnya untuk mendorong permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa Tahun 2019-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Sektor Industri, Investasi, IP-TIK, dan Jumlah Unit Usaha Industri secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh PDRB Sektor Industri, Investasi, IP-TIK, dan Jumlah Unit Usaha Industri secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Sektor Industri, Investasi, IP-TIK, dan Jumlah Unit Usaha Industri secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Sektor Industri, Investasi, IP-TIK, dan Jumlah Unit Usaha Industri secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa Tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu dapat bermanfaat karena adanya hal baru dalam penelitian dengan menggunakan variabel IP-TIK, yang selama ini belum banyak diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun implikasinya mengenai penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa sehingga dapat membandingkan antara teori yang penulis dapatkan dengan kenyataan di lapangan.

2. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi studi dan menambah literatur bagi lingkungan civitas akademika mengenai analisis determinan penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan dan strategi terkait untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, khususnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Banten.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah enam provinsi di Pulau Jawa yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2024 dengan pengajuan judul terlebih dahulu kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan. Adapun rencana kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian